

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN
(STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN-SUKSES)

SKRIPSI

OLEH

SAROHA DAVID SILALAH

208520003



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/25

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BABAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MEDAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA HANJIR
(STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN DENAI)



SKRIPSI
OLEH:
SAROHA DAVID SILALAH
298520003
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Implementasi peraturan walikota medan nomor 2 tahun 2016
tentang rincian tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana
banjir (studi kasus kecamatan medan denai)

Nama : Saroha David Silalahi

Npm : 208520003

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Beby Mashito Batubara S.Sos.MA¹

Ketua program studi
Administrasi Publik



Muda M.AP

Diketahui

Dekan Fakultas FISIP



Dr. Wani Suthafa S.Sos,M.I.P

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ,sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan seumbarannya secara jelas sesuai dengan norma,kaidah,dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku,apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 15 mei 2025



Saroaha David Silalahi
208520003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saroha David Silalahi

NPM : 208520003

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi peraturan walikota medan nomor 2 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi badan penanggulangan banjir (studi kasus kecamatan medan denai). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kota Medan
Tanggal : 15 Mei 2025
Yang Menyatakan



Sarooha David Silalahi

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH(BPBD) KOTA MEDAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
(STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN DENAI)**

SKRIPSI

OLEH:

SAROHA DAVID SILALAH

208520003



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

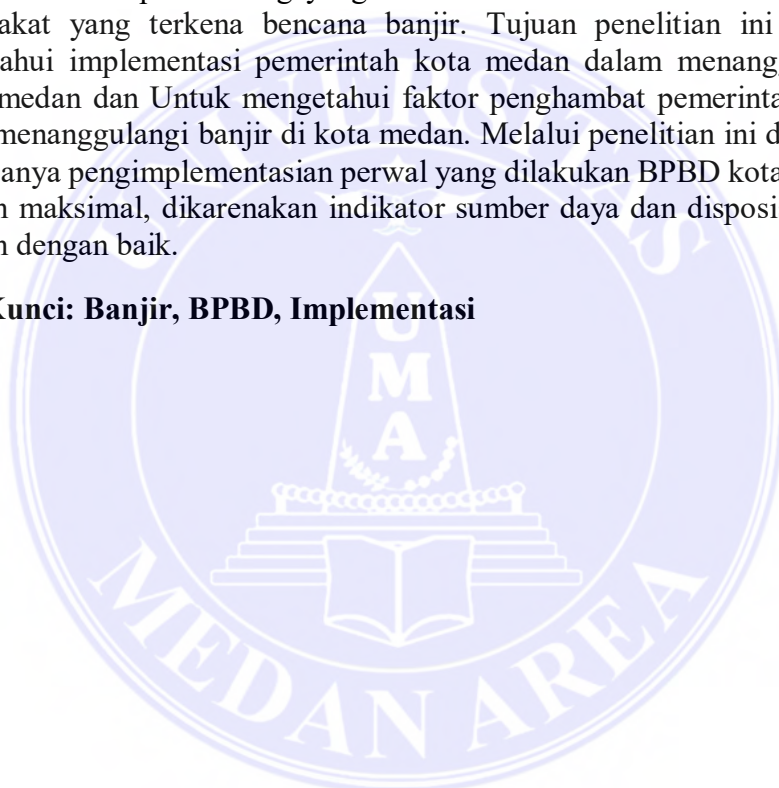
Document Accepted 6/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/25

ABSTRAK

Bencana banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih perlu adanya penanganan serius khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan, namun masalah yang memiliki dampak yang relative besar terhadap masyarakat. Banjir di Kota besar bukanlah hal yang mengejutkan jika terjadi, karena bencana tersebut sudah biasa dan sering terjadi, terutama di Kota Medan, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan penelitian peneliti adalah kepala bidang yang berada di BPBD Kota Medan dan beberapa masyarakat yang terkena bencana banjir. Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui implementasi pemerintah kota medan dalam menanggulangi banjir di kota medan dan Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah kota medan dalam menanggulangi banjir di kota medan. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwasanya pengimplementasian perwal yang dilakukan BPBD kota medan belum berjalan maksimal, dikarenakan indikator sumber daya dan disposisi yang belum berjalan dengan baik.

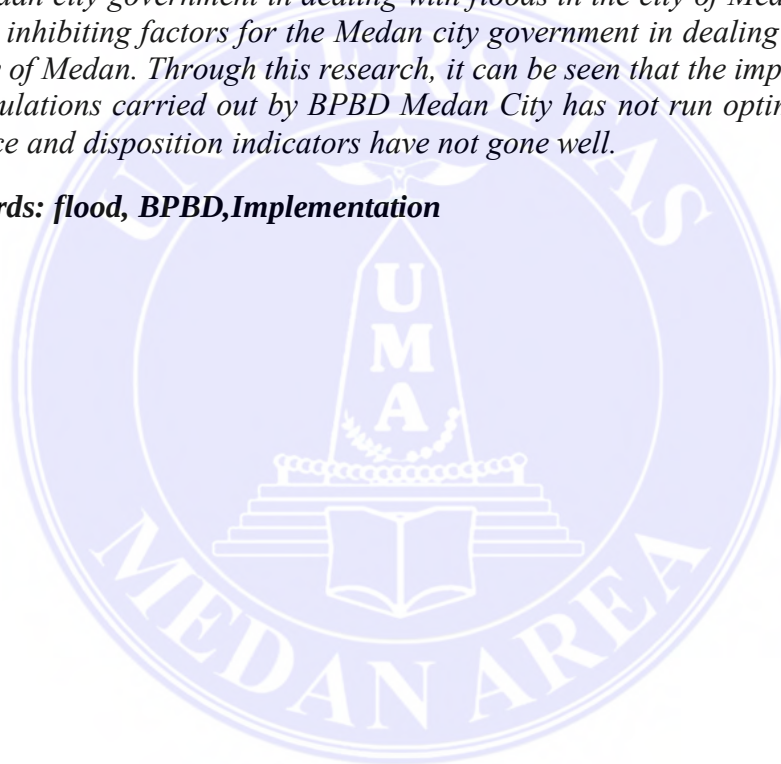
Kata Kunci: Banjir, BPBD, Implementasi



ABSTRACT

The flood disaster is a problem that still requires special serious handling from various parties, both from the government and society. Flooding is not a light problem, but a problem that has a relatively large impact on society. Floods in big cities are not surprising if they occur, because these disasters are common and often occur, especially in the city of Medan, so researchers are interested in conducting this research. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach, for data collection techniques in research, namely interviews, observation and documentation. The researchers' research informants were the heads of departments at BPBD Medan City and several communities affected by the flood disaster. The aim of this research is to determine the implementation of the Medan city government in dealing with floods in the city of Medan and to find out the inhibiting factors for the Medan city government in dealing with floods in the city of Medan. Through this research, it can be seen that the implementation of the regulations carried out by BPBD Medan City has not run optimally, because resource and disposition indicators have not gone well.

Keywords: flood, BPBD, Implementation



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Mulia Hilir Pada tanggal 10 Februari 2001 dari ayah Jansen Silalahi dan ibu Marito Sinaga Penulis merupakan putra ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara. Tahun 2019 Penulis lulus dari SMU Methodist 8 dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah tema social dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MEDAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR (STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN DENAI)”

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos,.MAP selaku pembimbing serta Beltahmamero Simamora, S.IP,MPA yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya. Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

(Sarooha David Silalahi)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP.....	iii
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR BAGAN	V
DAFTAR LAMPIRAN	VI
I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang Masalah.....	10
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.4.1 Manfaat Praktis	15
1.4.2 Manfaat Akademis	16
II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Kebijakan Publik.....	17
2.2 Implementasi.....	19
2.2.1 Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan	22
2.2.2 Model Implementasi	25
2.2.3 Tujuan Implementasi.....	29
2.3 Bencana	31
2.3.1 Bencana Alam.....	32
2.4 Penanggulangan Bencana	33
2.5 Banjir	34
2.6 Peneliti Terdahulu	36
2.7 Kerangka Berfikir	38
III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Waktu Penelitian.....	26
3.4 Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Medan	44
4.2 Gambaran Umum BPBD Kota Medan.....	46
4.3 Visi dan Misi BPBD Kota Medan	48
4.4 Pembahasan Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPBD Kota Medan dalam menanggulangi Bencana Banjir di Kota Medan	49
V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2 Waktu Penelitian	38
Tabel 3 Informan Penelitian	41



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berfikir	33
Bagan 2 Struktur Organisasi	42



BAB I

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana adalah sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan berdampak psikologis (UU No 24 Tahun 2007). Bencana banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih perlu adanya penanganan serius khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan, namun masalah yang memiliki dampak yang relative besar terhadap masyarakat. Menurut Yulaelawati dan syihab (2018:4), banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi datran atau daerah yang lebih rendah disekitar nya. Banjir sebenarnya merupakan fenomena kejadian alam “biasa” yang sering terjadi dihadapi nyaris diseluruh Negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia. Karena sesuai kodratnya, air akan mengalir dan menggenangi tempat-tempat yang lebih rendah.

Banjir dan permasalahannya dirasakan menjadi sesuatu yang “luar biasa” setelah kemampuan manusia untuk mengendalikan cara terajadinya banjir dan pengamanan terhadap daya rusak air, baik secara struktural dan non struktural ternyata tidak memadai. Dalam kondisi demikian manusia tidak akan mungkin dapat menghindari timbul nya kerugian sebagai akibat dari bencana banjir yang terjadi. Yang mungkin masih bisa dilakukan bagi manusia adalah berusaha bagaimana mencegah banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan di

aliran sungai sehingga membuat sampah menjadi menumpuk disuatu tempat dan manusia juga harus berusaha bagaimana mengurangi dampak kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir tersebut. (yulaelawati dan syihab 2018:6).

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajore* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko terhadap bencana. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bencana pada Undang Undang tersebut adalah sebuah peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia dengan kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat.

Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan.Bencana Daerah Kota Medan, maka tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan

pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, penanganan darurat, rehabilitasi , dan rekontruksi secara adil dan setara, serta berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait. Dalam rentang 6 (enam) tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tercatat lebih dari 4.000 – 5.000 kasus bencana banjir yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Adapun bencana banjir yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 516 kasus dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.271 kasus. (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB).

Salah satu kota yang terdampak banjir di indonesia adalah kota Medan, Terhitung pada tahun 2020 di 4 (empat) kecamatan Sebanyak 5.965 jiwa terdampak banjir. Banjir yang terjadi diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Denai. 4 (empat) kecamatan yang terdampak banjir tersebut diantaranya adalah Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Tuntungan. (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB). Luas areal di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami bencana banjir adalah seluas 12.805 km² (17,86 %). Wilayah yang mengalami tingkat risiko sangat tinggi terhadap banjir meliputi 12 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara antara lain : Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Nias.

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia tidak terlepas dari masalah banjir. Salah satu wilayah yang berpotensi dilanda banjir di Kota Medan yaitu DAS Babura, bagian dari DAS Deli di bagian hulu yang mempunyai topografi berupa perbukitan dan semakin ke hilir bertopografi dataran. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah topografi yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu daerah. Daerah yang tergenang banjir akibat meluapnya Sungai Babura terdiri dari 13 kelurahan, yaitu Kelurahan Darat, Merdeka, Padang Bulan, Petisah Hulu, Titi Rantai, Anggrung, Polonia, Madras Hulu, Suka Damai, Beringin, Kwala Bekala, Pangkalan Masyhur, dan Gedung Johor. Luas genangan yang paling besar terdapat di kelurahan Kwala Bekala dengan luas genangan sebesar 4.171 Km² dan kelurahan Pangkalan Mashyur dengan luas genangan sebesar 4.493 Km². Estimasi biaya kerusakan rumah akibat banjir di DAS Babura di kelurahan Kwala Bekala ialah sebesar Rp 5.886.226.643 dan di kelurahan Pangkalan Mashyur ialah sebesar Rp 5.575.224.667 (Meidina, 2017).

Berdasarkan hasil data diatas bahwasanya sudah sering terjadinya banjir dikota medan dengan luas gengangan yang cukup luas, dan tentunya hal tersebut sudah ditangani oleh BPBD Kota Medan, namun pada kenyataannya pihak pelaksana penanggulangan dalam mengimplementasikannya tidak berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini bahwa bencana yang diteliti ialah bencana banjir maka dari itu dalam penelitian ini bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan merupakan penanggulangan bencana terhadap bencana banjir yang sering terjadi di Kota Medan. Permasalahan mengenai bencana banjir sering juga terjadi di wilayah

kota Medan. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Medan dan prinsip-prinsip dalam menangani atau menanggulangi bencana banjir.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang banjir yang tidak pernah tuntas permasalahan nya di kota Medan dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DIKOTA MEDAN** ” dengan studi kasus di kantor BPBD kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam menanggulangi bencana banjir di kantor BPBD Kota Medan ?
2. Apa faktor penghambat pemerintah kota medan dalam menanggulangi banjir di kota medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemerintah kota medan dalam menanggulangi banjir di kota medan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah kota medan dalam menanggulangi banjir di kota medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi penulis yang bermanfaat untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Medan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca serta dapat dijadikan referensi dalam pengkajian tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang pemimpin. Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Menurut Dunn (2017:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan seperti pertanahan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Menurut Mulyadi (2015:37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Menurut Mustopadidjaja (Tahir, 2014:21), menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh

pemerintah untuk memecahkan masalah- masalah yang ada di publik maupun pemerintah.

2.1.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik ke dalam beberapa tahap, Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Tahap penyusunan Agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada ahirnya, beberapa beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah-masalah yang karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan tersebut dapat berasal dari berbagai

alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy actions) yang ada.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari begitu banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementer), dan ada juga beberapa yang akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah.

2.2 Implementasi

Dalam suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan atau menetralkan dalam suatu masalah. Suatu persepektif dalam analisa kebijaksanaan dimana “Analisis” secara eksekusif dihubungkan dengan pemecahan problem kedalam bagian-bagian pokoknya, yang kemudian ditandai dengan nilai-nilai numerik untuk tujuan memilih salah satu tindakan yang paling dalam memecahkan masalah (William N.Dun,1988:39). Setelah adanya kebijakan, pemerintah segera untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan. Dapat di artikan Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan berupa tindakan nyata sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Waluyo, 2016:49) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif

yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan, dalam pengertian yang luas dipandang sebagai suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan. Tindakan-tindakan yang dilakukan itu harus mampu mengaitkan antara tujuan yang dirumuskan dan realisasi atau hasil yang akan dan atau telah dilakukan, agar ada sinkronisasi. Grindle dalam Subarsono (2014:6) menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah, dengan menyatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membangun hubungan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Karena itu, dalam melibatkan penciptaan sistem penyampaian kebijakan, di mana cara-cara khusus dirancang dan diupayakan dengan harapan tiba di tujuan tertentu.

Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2006:139) mengidentifikasi implementasi kebijakan, merupakan “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Dari deventisi diatas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut menyangkut tiga hal yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi dalam hal proses kebijakan sangat di perlukan karena untuk mencapainya kebijakan yang efektif di perlukannya impementasi yang efektif sehingga membuat kebijakan tersebut tepat untuk di tetapkan. Penerapan implementasi adanya tindakan yang terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya ketentuan – ketentuan yang sah pada kebijakan untuk menghasilkan suatu implementasi baru.

2.2.1 Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implemmentasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan

pengertian dengan cara breakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut (George C. Edwards III: Mulyadi 2016) sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi

faktor komunikasi sangat penting dalam penerapan kebijakan yang diterapkan dalam pemerintah baik terhadap staf yang paling bawah dan terhadap yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat

melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan.

2. Faktor Sumberdaya

Faktor sumberdaya merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan kebijakan karena pemerintah harus mempunyai sumberdaya yang tepat dalam bidangnya masing-masing dalam menjalankan kebijakan tersebut. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

3. Faktor Disposisi

Faktor disposisi ini lebih ke sikap yang atau watak yang bagus yang harus dimiliki oleh seorang implementor dalam pelaksanaan yang dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar

mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang diterapkan harus berdasarkan kebutuhan dalam organisasi. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik organisasi (misalnya dukungan antara anggota legislative dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi.
5. Tingkat komunikasi terbuka yaitu jaringan komunikasi horizontal maupun vertical serta bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksanaan keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan Kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. (dikutip dalam buku mulyadi 2016 : 66) studi kebijakan public dan pelayanan publik bandung: Afabeta.

2.2.2 Model Implementasi

Beberapa ahli berbeda pandangan mengenai keberhasilan suatu implementasi kebijakan apabila diterapkan dalam dunia nyata. Perbedaan tersebut maksudnya adalah ada sebagian para ahli mengemukakan bahwa implementasi kebijakan itu dapat berhasil jika didukung oleh faktor-faktor yang saling menguatkan seperti sebuah sistem yang saling terkait, dan disisi lain ada yang mengemukakan sebagai variabel-variabel. Perbedaan pandangan tersebut adalah logis karena tergantung pada konteks mana para ahli kebijakan itu memandangnya dari berbagai sisi masing-masing. Dalam mengkaji berbagai faktor dan atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan akan dipaparkan beberapa model implementasi kebijakan sebagai bagian berikut:

a. Model Edwards III

Edwards III dalam Subarsono (2014:9) berpandangan bahwa dalam mengkaji implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: *“What are the preconditions for successful policy*

implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?" Maksudnya, apa prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan? Apa hambatan utama keberhasilan implementasi kebijakan? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan menguraikan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel- variabel tersebut adalah: *communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure.*

2.2.3 Tujuan Implementasi

Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.

1. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
2. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
4. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
5. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.

2.3 Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana atau prasarana, lingkungan, utilitas umum, hilangnya sumber-sumber kehidupan, serta hilangnya akses terhadap sumber kehidupan. Bencana itu dapat berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung merapi, angin topan dan badai, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, serangan hama tanaman atau penyakit hewan, epidemi, pandemi atau kejadian luar biasa, kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, pencemaran lingkungan, dan kerusakan sosial.

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri¹⁶. Dalam Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik dari faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dari pengertian diatas, bencana secara umum merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia. Pemahaman tentang istilah bencana dari beberapa orang meskipun beragam namun

pada endingnya atau ujung-ujungnya, semua mengindikasikan sebagai peristiwa buruk yang merugikan kehidupan manusia.

2.3.1 Bencana Alam

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Bencana alam adalah konskuensi untuk keterlibatan manusia pada pengrusakan alam yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

1. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, topan, tsunami dll

2. Bencana Non Alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.

3. Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat dan teror.

Bencana alam ada banyak sekali jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu bencana alam geologi, bencana alam, meteorologi, dan bencana alam ekstra-terestial. Berikut penjelasan selengkapnya.

1. Bencana Geologi

Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Contoh bencana alam geologi paling umum adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan tanah longsor.

2. Bencana Meteorologi

Bencana alam meteorologi/hidrometeorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana alam bersifat meteorologis paling banyak terjadi diseluruh dunia seperti banjir dan kekeringan. Kekhawatiran terbesar pada masa modernisasi sekarang ini adalah terjadinya pemanasan global.

3. Bencana alam ekstra-terestial

Bencana alam ekstraterestial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampaknya berukuran kecil tidak berpengaruh besar, asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga bisa menimbulkan untuk menabrak bumi.

2.4 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada maupun sesudah terjadinya bencana. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan

pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi. Penanganan bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Jadi pengertian ini justru berangkat dari sikap bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan suatu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antar instansi. Karena sebagai suatu sistem kerja sama, disini dapat secara langsung bersama-sama menangani proyek tertentu. Namun juga dapat secara partial yaitu tidak langsung, dimana saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah.

Implementasi peraturan walikota medan nomor 2 tahun 2018 dalam rangka penanggulangan bencana daerah adalah untuk meningkatkan penanganan atau penanggulangan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dengan penanganan badan penanggulangan bencana yang ada di kota medan khususnya banjir dengan penetapan pedoman dan arahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan juga

rekontruksi secara adil dan setara yang dipimpin oleh kepala pelaksana intansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana, antara lain:

1. Kegiatan pencegahan bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
2. Kesiapsiagaan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
3. Peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
4. Mitigasi yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
5. Tanggap darurat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Sasaran utama dari tahap tanggap darurat adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak, serta

pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana.

6. Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.
7. Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat

Dari beberapa upaya diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

2.5 Banjir

Menurut Erlangga (Lestari dkk, 2016) banjir adalah genangan air yang mengalir deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Pada saat banjir, air akan menggenangi sebagian besar daratan yang biasanya tidak tergenangi air. Ketika musim hujan tiba, sebagian wilayah ada yang mengalami banjir. Curah hujan yang tinggi membuat beberapa wilayah tergenang air. Banjir yang sangat berbahaya adalah banjir dahsyat yang terjadi dengan tiba-tiba dan bersifat menghanyutkan. Menurut Paimin dkk (2010) banjir diartikan sebagai

suatu aliran berlebih atau penggenangan yang datang dari sungai atau badan air lainnya dan menyebabkan atau mengancam kerusakan. Perbedaan antara debit normal dan aliran banjir ditentukan oleh tinggi aliran air dimana banjir ditunjukkan dengan aliran air yang melampaui kapasitas tampung tebing/tangul sungai sehingga menggenangi daerah sekitarnya.

Menurut Bakornas (Jaswadi dkk, 2012) banjir memiliki dua pengertian yaitu:

1. Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air.
2. Gelombang banjir berjalan kearah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara akibat badai.
3. Dari pengertian banjir menurut ahli diatas dapat disimpulkan bahwa banjir adalah tingginya intensitas air yang membuat suatu wilayah tergenang dan mengakibatkan kerugian bagi yang terdampak.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Lorencia Pradipta Barus yang membahas tentang Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan. Hasil dari penelitian ini yaitu BPBD Kota Medan belum berperan secara maksimal dalam penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan baru

terbentuk selama 1 tahun dan masih banyak hambatan yang dialami, seperti persoalan koordinasi dengan berbagai instansi yang berkaitan sarana dan prasarana yang belum memadai. Termasuk belum maksimalnya peranan BPBD Kota Medan dalam menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, tersendiri dan standarisasi penanganan bencana.

2. Skripsi Amalina Dyah Purwoningrum yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan dengan baik, dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 BPBD Kabupaten Banjarnegara melakukan sosialisasi dan pelatihan relawan/ SAR sebelum terjun ke lapangan yang terkena bencana, dalam bidang kedaruratan dan logistic BPBD mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistic, dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Banjarnegara melakukan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya BPBD

Kabupaten masih belum maksimal pasalnya dalam tugasnya BPBD dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara belum mempunyai peralatan yang sesuai dengan standardisasi yang diatur dalam Perundang-undangan , kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan proses penanggulangan bencana terhambat padahal dukungan dari pemerintah selalu maksimal. kurangnya koordinasi yang baik dari BPBD kepada instansi/organisasi yang lain juga menjadi kendala saat proses penanggulangan bencana. Faktor pendukung implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 dukungan dari aparat pemerintah dan instansi/ organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana yang selalu maksimal dalam memberikan dukungannya, baik saat terjadi bencana dan pasca bencana. Faktor penghambat dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Banjarnegara. Upaya untuk mengatasi hambatan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan relawan serta para penggiat yang aktif di penanganan bencana yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Upaya dalam segi peralatan saat terjadi bencana BPBD Kabupaten Banjarnegara meminta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD yang jaraknya dekat dengan Kabupaten Banjarnegara

2.7 Kerangka Berfikir

Bagan 1 Kerangka Berfikir

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN
FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI
BENCANA BANJIR DIKOTA MEDAN**

Teori Implementasi Edward III:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Watak atau sikap
4. Struktur Birokrasi

2.8 Penelitian Terdahulu

Table 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Metode Peneliti	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
1	implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Medan Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Kantor Bpbd Kota Medan)	Muhammad berkah simatupang (2021)	Kualitatif Deskriptif		Mekanisme dalam menjalankan penanggulangan bencana banjir pentingnya mengkaji bencana, kerangka berfikir dalam mengelola dan menanggapi bencana lebih sering di lakukan pasca bencana dimana bencana sudah terlanjur menimbulkan kerugian masyarakat. Pemerintah harus cepat untuk memberikan bantuan kepada para korban, upaya di lakukan di berikannya kebijakan yaitu program pengurangan risiko bencana (PRB) pelaksanaan ini di lakukannya sebelum terjadinya bencana, dan masyarakat dapat melihat dampaknya langsung.
2	Analisis Pemberdayaan	Aisyah Rambe	Kualitatif Deskriptif		Berdasarkan hasil pembahasan,

	Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan	(2017)			maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang berhasil adalah indikator disposisi dan indikator struktur birokrasi. Sedangkan indikator yang tidak berhasil adalah indikator komunikasi dan indikator sumber daya. Penyebab tidak berhasilnya indikator tersebut karena memiliki kendala yaitu: 1.Kurangnya kesadaran masyarakat 2.Kurangnya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia)
3	IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BPBD PROVINSI DKI JAKARTA	Rizal Wahyudha (2018)	Kualitatif Deskriptif		ada tahapan pra bencana banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan tahapan kesiagaan. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam

					menghadapi datangnya suatu bencana. Dimana hal tersebut direalisasikan dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat melalui agen masyarakat seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), instansi pemerintah tingkat Kelurahan, Stake Holder, dan Karang Taruna. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kepanikan masyarakat apabila akan terjadinya bencana banjir melanda.
--	--	--	--	--	---

Sumber: Dokumentasi Peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Menurut Moleong (2014:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain. Menurut Sugiono (2016:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variabel lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun yang menjadi

lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No 2.

3.3 Waktu Penelitian

Tabel 2 Waktu Penelitian

No	Urian Kegiatan	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
1.	Penyusunan proposal										
2.	Seminar Proposal										
3.	Perbaikan Proposal										
4.	Penelitian/riset										
5.	Penyusunan Skripsi										
6.	Seminar Hasil										
7.	Perbaikan Skripsi										
8.	Sidang Meja Hijau										

Sumber: Dokumentasi Peneliti

3.4 Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian. Dimana dari data tersebut akan diperoleh upaya pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi Bencana Banjir Dikota Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

Dari sumber data sekunder peneliti dapat menemukan persamaan/perbedaan dari setiap jurnal yang ada, dari jurnal itu akan dikembangkan peneliti dalam menentukan tujuan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Bogden (Sugiono, 2016:140) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam

mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam Teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
4. Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

3.6 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2012:132) informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mendapat sumber informasi yang terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan.

Informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 3 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Status Informan	Keterangan	Metode
1	Baharuddin Ritonga, S.STP, M.AP	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Informan kunci	Wawancara
2	Ahmad Untung Lubis, S.Sos, MM	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	Informan utama	Wawancara
3	Ibu kiki		Informan utama	Wawancara
4	Agustriani	Masyarakat	Informan tambahan	wawancara
5	Halima Tusadia Pulungan	Masyarakat	Informan tambahan	Wawancara
6	Andreas Seprito Sinaga	Masyarakat	Informan tambahan	Wawancara

Sumber: Dokumentasi Peneliti

BAB IV

SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

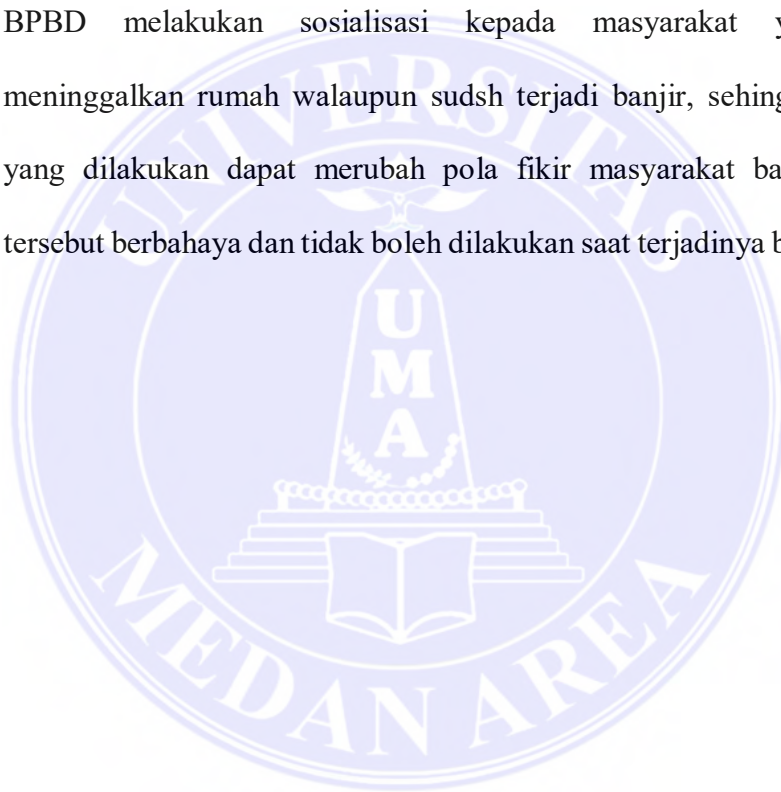
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang berhasil adalah indikator disposisi dan indikator struktur birokrasi. Sedangkan indikator yang tidak berhasil adalah indikator komunikasi dan indikator sumber daya. Penyebab tidak berhasilnya indikator tersebut karena memiliki kendala yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir
2. Kurangnya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia)
3. Kurangnya kebijakan dan pengertian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

BPBD memiliki peran sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana banjir rob yang telah di bentuk sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 dan sudah memiliki tupoksi sesuai dengan peraturan. Namun ternyata di lapangan tetap memiliki beberapa kendala sehingga BPBD yang memiliki peran sebagai lembaga penanggung jawab belum bisa mengimplementasikan tugas nya yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tersebut.

5.2 Saran

1. Seharusnya BPBD memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak menjaga lingkungan atau mencemari lingkungan, dengan begitu BPBD sendiri akan terbantu dengan kesadaran masyarakat Kota Medan untuk mengurangi terjadi nya bencana banjir.
2. BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang enggan meninggalkan rumah walaupun sudah terjadi banjir, sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat merubah pola pikir masyarakat bahwasanya hal tersebut berbahaya dan tidak boleh dilakukan saat terjadinya bencana banjir.



LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara BPBD Kota Medan

Nama:

Jabatan:

Usia:

1. Bagaimana struktur organisasi BPBD Kota Medan? Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab perbidang?
2. Siapa sajakah yang terlibat dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir tersebut? Apakah ada bekerja sama dengan instansi atau Lembaga lain?
3. Apasaja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Medan dalam melakukan penanggulangan bencana?
4. Kendala apa yang dialami oleh BPBD Kota Medan dalam melakukan pencegahan bencana di Kota Medan?
5. Apakah pengimplementasian Peraturan Walikota Medan Nomor 02 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Medan?
6. Apakah BPBD Kota Medan memiliki SOP?
7. Apakah SOP yang ada sudah berjalan dengan baik?

2. Pedoman Wawancara Masyarakat Kota Medan

Nama:

Pekerjaan:

Usia:

1. Apakah daerah rumah bapak/ibu rawan terjadi bencana banjir?
2. Apakah bapak/ibu tau apa itu BPBD?
3. Apakah sebelum nya bapak/ibu pernah melihat secara langsung saat BPBD membantu masyarakat yang terkena bencana banjir?
4. Apakah bapak/ibu pernah merasakan atau mendapatkan bantuan bencana banjir dari BPBD?
5. Apa saja yang dilakukan oleh BPBD dalam membantu bapak/ibu saat terjadi bencana banjir?

3. DOKUMENTASI PENELITIAN



Sumber: Ibu kiki



Sumber: Ibu Agustriani



Sumber: Bapak Andreas Seprito Sinaga



**(perahu karet yang digunakan oleh BPBD kota Medan dalam
mengevakuasi korban bencana)**



(pelampung yang digunakan oleh BPBD kota Medan dalam mengevakuasi
korban bencana)





(kendaraan yang digunakan oleh BPBD kota Medan)



(Foto dokumentasi bersama masyarakat yang menerima bantuan)



(Foto Bersama dengan masyarakat yang menerima bantuan)

Ibu Halimah



(Foto bersama dengan masyarakat yang menerima bantuan)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmawi, M.2003. *Persoalan Kemiskinan dalam Orientasi Kebijakan Pembangunan Bandung*: Majalah Ilmu PDP Unpad Prakarsa.
- Benjamin., Tasman., & Abdul. 2017. *Pengembangan sumber daya manusia: teori, Dimensi, Pengukuran, dan Implementasi dalam organisasi* . Yogyakarta: Zahir Publishing.
- BNPB, Buku Saku Tanggap Tangkas Menghadapi Bencana, (Edisi 2012).
- Edwards III, G. C. (2006). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc
- Farida, Y.T. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Pelatihan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- Mustari, Nuryanti, 2013. *Implementasi Kebijakan Publik* , Makassar Membumi Publishing.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal/Skripsi

- Arifin, Saru. “Studi Model Kebijakan Mitigasi Difabel Korban Bencana Alam (Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta),” (Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008).
- Bakornas PB, 2007, *Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya*, Jakarta
- BNPB, 2011. *Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia*, Jakarta
- Kodoatie, Robert J, Suharyanto, Sangkawati, Sri, dan Edhisono, Sutanto, 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*, CV. Andi, Yogyakarta

Larama, R. (2020). Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Lombok. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram 1-79.

M Edwin Fransasiari, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir dimasyarakat kota Medan tahun 2020, jurnal bidang ilmu Kesehatan. Vol 11 No 2

Matondang, I. R. (2016). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Penanggulangan Bencana Alam. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 176-185.

Mardikaningsih S.M.dkk.2016. Studi kerentanan dan arahan mitigasi bencana banjir di kecamatan puring kabupaten kebumen. Jurnal GeoEco, 3(2) : 157-163

Nurjanah dkk, Manajemen Bencana, Bandung: Alfabeta, 2012

Nawi, Rusdin, 2018. Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia. Jurnal Universitas SatriaMakassar.

Simatupang, M.B. (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DIKOTA MEDAN DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI KASUS KANTOR BPBD KOTA MEDAN DENAI). Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1-112.

Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.